

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan tersebut menjadi suatu kewajiban, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001).

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti yang terjadi pada BPKP Riau tahun 2017, terdapat kasus korupsi proyek lampu sorot pemkot Pekanbaru Riau mencapai Rp2,696 Miliar. Lima tersangka dalam kasus ini antara lain berinisial A alias N, MHR dan oknum pejabat Pemkot Pekanbaru selaku PPK berinisial M. Kemudian ABD dari pihak swasta dan seorang lagi berinisial HW. ([www.goriau.com](http://www.goriau.com)). Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu dan kesempatan.

Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Ketidakefisienan tersebut selanjutnya berpengaruh pada pemborosan anggaran dan keuangan (Ruslan, 2011). Statement di atas menjelaskan bahwa profesi audit internal belum berfungsi sebagai alat pengawasan.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2005).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang salah satunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam tugasnya BPKP sama dengan internal auditor. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, termasuk BPKP (Mardiasmo, 2005).

Auditor BPKP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sebagai internal auditor dituntut untuk memiliki hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (DeAngelo dalam Alim, 2007). Sedangkan tujuan dari probabilitas adalah untuk menemukan pelanggaran yang tergantung

pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Deis dan Groux dalam Alim, 2007).

Sementara itu dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Samelson *dkk*, 2006). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Elfarini, 2007).

Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit adalah bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Lebih lanjut dijelaskan proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat *quality assurance* apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain : *standar for the professional practice, internal audit charter*, kode etik internal audit, kebijakan, tujuan dan prosedur audit, serta rencana kerja audit (Pramono, 2003).

Berkaitan dengan standar audit, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan audit berpedoman pada standar audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam Standar umum pertama APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian . Keahlian adalah kompetensi yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif (Lee dan Stone dalam Elfarini, 2007). Auditor harus memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi,



program, dan kegiatan pemerintah (Ali Afrizal, 2016 ). Keahlian auditor dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit (Tampubolon, 2005).

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktek akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002). Independensi juga berarti adanya kejujuran pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap independensi dalam melakukan audit diperlukan agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998). Standar umum kedua APIP menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi harus dipertahankan oleh APIP dan para auditornya. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menghasilkan pendapat atau simpulan audit yang objektif.

Selain keahlian dan independensi seorang auditor juga harus memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik (Foster, 2001). Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi

yang ditekuninya. Dengan banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki, auditor akan dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya, karena memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Maka keahlian (kompetensi), independensi, pengalaman kerja, dan motivasi merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas audit dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Namun, belum tentu auditor yang memiliki ketiga hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Karena motivasi merupakan sebagai keinginan di dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak (Terry dalam Moekijat, 2002). Motivasi akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan mencapai kinerja yang maksimal.

Berbagai penelitian mengenai kualitas audit telah banyak dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi untuk mengukur kualitas audit. Penelitian tersebut diantaranya, Ashari Ruslan (2011) dengan judul penelitian pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keahlian dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian Nur Samsi, dkk (2013) dengan judul pengaruh pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selanjutnya, ada penelitian Efendy (2010) dengan judul pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kualitas audit hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Harvita (2012) juga menunjukkan bahwa pengalaman audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Ulfa (2014) penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ali (2016) yang meneliti mengenai Pengaruh Keahlian, Independensi, Pengalaman Kerja dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten Kampar yang mana hasilnya menunjukkan bahwa keahlian, independensi, dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda yaitu di BPKP Riau.

Objek dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau yang berjumlah sebanyak 90 orang. Alasan dipilihnya objek penelitian ini adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2014, dari 13 pemerintah



kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Riau yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 7 pemerintah daerah atau 53,85% pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 6 pemerintah daerah atau 46,15% memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Masih banyaknya LKPD yang belum memperoleh opini WTP juga disebabkan oleh kurang andalnya penyelenggaraan SPIP, belum tertibnya pengelolaan asset daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3, menjelaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu: 1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/ atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; 3) Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/ atau atas permintaan Kepala Daerah; 4) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; 5) Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, antara lain: 1) Audit Keuangan, 2) Audit Kinerja, 3) Audit Operasional, 4) Audit Investigasi, dan 5) Strategi Pemberantasan Korupsi. Adapun jenis laporan audit yang dihasilkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau yaitu: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2)

Neraca, 3) Laporan Operasional (LO), 4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan kondisi real yang ada pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Keahlian, Independensi, Pengalaman Kerja dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Pada BPKP Riau**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keahlian terhadap kualitas audit pada BPKP Riau.
2. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada BPKP Riau.
3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada BPKP Riau.
4. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kualitas audit pada BPKP Riau.
5. Bagaimana pengaruh keahlian, independensi, pengalaman kerja, dan motivasi terhadap kualitas audit pada BPKP Riau.

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh keahlian terhadap kualitas audit.



2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis motivasi terhadap kualitas audit.
5. Untuk menganalisis pengaruh keahlian, independensi, pengalaman kerja dan motivasi terhadap kualitas audit.

## 2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu dan tambahan literatur tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh Keahlian, Independensi, Pengalaman Kerja dan Motivasi terhadap Kualitas Audit.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi profesi akuntan, informasi ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi para akuntan untuk dapat lebih independen dalam melakukan profesinya, serta membangkitkan naluri profesionalnya dalam memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat luas.
- b. Bagi BPKP, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan BPKP dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga BPKP diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.
- c. Bagi pemakai laporan keuangan, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap laporan yang dihasilkan oleh auditor,

sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang relevan dalam menentukan keputusan yang akan dilaksanakan.

- d. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Telaah Pustaka dan Hipotesis**

Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik, dan kerangka pemikiran.

##### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis, dan uji hipotesis.

##### **BAB IV Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum pada BPKP Riau.

## BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

